

**PERAN MEDIA KORAN MANDALA DALAM FUNGSI WATCHDOG
PERS SEBAGAI BAGIAN DARI CIVIL SOCIETY DI KOTA BANDUNG**

***THE ROLE OF KORAN MANDALA MEDIA IN THE WATCHDOG
FUNCTION OF THE PRESS AS PART OF CIVIL SOCIETY IN BANDUNG
CITY***

Angelina Qur'ainny, Zahran Fauzi Hidayat dan Muradi

Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

Korespondensi Penulis : angelina23002@mail.unpad.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Angelina Qur'ainny, Zahran Fauzi Hidayat dan Muradi. *Peran Media Koran Mandala dalam Fungsi Watchdog Pers sebagai Bagian dari Civil Society di Kota Bandung*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.10 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Koran Mandala sebagai media lokal dalam menjalankan fungsi *watchdog* pers sebagai bagian dari *civil society* di Kota Bandung. Studi ini penting karena kajian tentang jurnalisme *watchdog* di Indonesia masih didominasi oleh media nasional, sementara peran media lokal dalam pengawasan kekuasaan dan pembentukan ruang publik demokratis belum banyak ditelaah secara mendalam. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan jurnalis dan redaktur, observasi praktik pemberitaan, serta analisis dokumen terhadap liputan investigatif dan artikel opini Koran Mandala pada periode 2022–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koran Mandala menjalankan fungsi *watchdog* melalui pemberitaan kritis terhadap tata kelola pemerintahan daerah, dugaan korupsi, dan kebijakan publik yang berdampak langsung pada masyarakat. Praktik jurnalisme tersebut berkontribusi pada pembentukan opini publik, peningkatan kesadaran warga, serta penguatan akuntabilitas pemerintah daerah. Temuan ini menegaskan bahwa media lokal.

Kata Kunci: Demokrasi Lokal, Jurnalisme Watchdog, Media Lokal, Partisipasi Publik, Bandung

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of Koran Mandala as a local newspaper in performing the press watchdog function as part of civil society in Bandung City. This research is significant because existing studies on watchdog journalism in Indonesia have predominantly focused on national media, while the role of local newspapers in monitoring power and shaping democratic public spaces remains underexplored. Using qualitative descriptive method with a case study approach, data were collected through in-depth interviews with journalists and editors,

observation of news production practices, and document analysis of investigative reports and opinion articles published by Koran Mandala between 2022 and 2024. The findings indicate that Koran Mandala plays a substantial watchdog role by critically reporting on local governance, alleged corruption, and public policies that directly affect citizens. Such investigative coverage contributes to public opinion formation, enhances civic awareness, and strengthens local government accountability. This study highlights the strategic importance of local media in reinforcing democratic values and the role of civil society at the municipal level.

Keywords: *Local Democracy, Watchdog Journalism, Local Media, Public Participation, Bandung*

A. PENDAHULUAN

Demokrasi modern membutuhkan ruang publik yang terbuka dan kritis agar warga negara dapat mengawasi jalannya kekuasaan. Civil society berperan sebagai arena sosial independen yang mengontrol negara dan memperjuangkan kepentingan publik, dan pers merupakan bagian penting di dalamnya sebagai fourth estate yang menjalankan fungsi kontrol sosial (watchdog). Dalam sistem demokrasi, kebebasan pers dan praktik demokrasi saling bergantung: pers memerlukan jaminan kebebasan untuk mengawasi kekuasaan, sementara demokrasi memerlukan pers yang bebas agar pemerintahan tetap akuntabel.

Reformasi 1998 membawa perubahan besar bagi relasi negara, masyarakat sipil, dan pers di Indonesia melalui amandemen konstitusi dan pemberlakuan UU No. 40/1999 tentang Pers. Meski demikian, demokrasi elektoral pascareformasi masih menghadapi masalah seperti klientelisme, oligarki, dan kooptasi media oleh kepentingan politik dan ekonomi. Dalam konteks ini, fungsi watchdog pers, terutama pada level lokal yang sering kurang menjadi sorotan media arus utama.

Secara teoritis, fungsi pers mulai dari surveilans, korelasi sosial, hingga transmisi budaya menegaskan peran media dalam menyediakan informasi dan mengawasi penyimpangan kekuasaan. Namun, uraian teoritis yang panjang seringkali menutupi fokus penelitian; karena itu, dalam studi ini teori media hanya digunakan sebagai kerangka dasar untuk melihat bagaimana media lokal menjalankan fungsi kontrolnya dalam konteks demokrasi lokal.

Pada level lokal, pers memiliki peran krusial karena arena pemerintahan daerah lebih rentan terhadap praktik tertutup, kolusi politik, dan minim pengawasan publik. Bandung sebagai suatu kota besar dengan dinamika sosial-politik tinggi dan sejarah civil society yang untuk mengkaji peran media lokal.

Meski demikian, penelitian mengenai media lokal Bandung masih terbatas. Studi sebelumnya lebih banyak membahas media digital atau media nasional dalam pemberitaan terkait Bandung, sementara kajian media cetak lokal, terutama yang memiliki akar komunitas seperti Koran Mandala masih jarang dilakukan.

Koran Mandala merupakan salah satu media cetak tertua di Kota Bandung yang telah hadir sejak era Orde Baru dan bertahan melewati berbagai fase politik mulai dari rezim otoritarian, masa transisi reformasi, hingga era digital. Dengan sejarah panjang tersebut, Koran Mandala memiliki posisi strategis dalam pembentukan opini publik lokal serta menjadi contoh bagaimana pers daerah beradaptasi terhadap perubahan sistem politik dan teknologi media. Namun, hingga kini belum banyak kajian akademik yang mengkaji secara kritis bagaimana Koran Mandala menjalankan fungsi watchdog dan kontribusinya terhadap penguatan civil society di tingkat lokal.

Literatur terbaru menunjukkan bahwa isu mengenai relasi pers, negara, dan civil society di Indonesia masih menjadi perhatian penting. Hady & Ibrahim (2023) menegaskan bahwa setelah kejatuhan Orde Baru, relasi negara–media–masyarakat sipil masih dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan yang tidak sepenuhnya demokratis. Sementara itu, Rusfiana & Kurniasih (2023) menunjukkan bahwa civil society berperan dalam mendorong perubahan sosial-politik, namun kapasitas pengawasan publik sangat bergantung pada kualitas informasi dari media. Kemudian Putra, Lestari, & Widodo (2024 [artikel 2023 accepted]) menyoroti bahwa kebebasan pers di Indonesia masih menghadapi berbagai inkonsistensi struktural, termasuk pada level daerah.

Studi mengenai jurnalisme watchdog di Indonesia juga berkembang, seperti penelitian Alyatalathaf & Putri (2022) yang menelaah praktik jurnalisme investigatif Tempo dalam mengkritisi kebijakan pemerintah selama pandemi. Krisdinanto, Apul, & Ritonga (2024 [data 2023]) menunjukkan melemahnya firewall redaksi di media Indonesia akibat tekanan ekonomi-politik, sehingga independensi media semakin rentan. Temuan ini relevan bagi media lokal yang memiliki ketergantungan lebih besar terhadap pendapatan iklan dan kedekatan dengan elit lokal. Namun, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada media nasional dan tidak membahas media lokal Bandung.

Kajian khusus mengenai media lokal justru minim. Laporan penelitian Humas FISIP UI (2023) menyatakan bahwa media lokal di era desentralisasi menghadapi relasi kuasa yang kompleks dengan pemerintah daerah, yang sering kali memengaruhi independensi pemberitaan. Meski demikian, penelitian tersebut tidak menyoroti media Bandung dan tidak membahas media cetak tradisional yang memiliki sejarah panjang seperti Koran Mandala.

Belum ada penelitian empiris yang secara khusus mengkaji bagaimana Koran Mandala sebagai media lokal Bandung menjalankan fungsi watchdog dan mempertahankan independensinya dalam tekanan politik-ekonomi lokal dan dirupsikan digital. Padahal, sebagai media yang lahir pada masa kontrol ketat Orde Baru dan kemudian menghadapi liberalisasi pers pascareformasi serta kompetisi media digital sejak 2010-an, Koran Mandala merupakan kasus untuk memahami transformasi pers lokal. Kondisi tersebut menunjukkan urgensi penelitian ini untuk mengisi kekosongan kajian mengenai peran pers lokal Bandung dalam demokrasi lokal, terutama terkait fungsi kontrol sosial yang dijalankan Koran Mandala.

Kesenjangan inilah yang menjadi dasar diperlukannya penelitian ini. Selain itu, pers lokal menghadapi tekanan ekonomi dan politik yang dapat memengaruhi independensi pemberitaan. Dianto (2018) mencatat bahwa media daerah sering kehilangan independensinya akibat ketergantungan pada iklan, kerja sama pemerintah daerah, serta tekanan elite lokal, terutama menjelang kontestasi elektoral. Kondisi ini memunculkan pertanyaan apakah pers lokal benar-benar menjalankan fungsi watchdog atau justru menjadi alat legitimasi kekuasaan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan diri pada bagaimana Koran Mandala menjalankan fungsi kontrol sosialnya dalam konteks demokrasi Kota Bandung. Berdasarkan penjelasan di atas rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Koran Mandala merepresentasikan isu-isu politik dan pemerintahan Kota Bandung?
2. Sesejauh mana Koran Mandala menjalankan fungsi watchdog terhadap pemerintah daerah?
3. Faktor-faktor apa yang memengaruhi independensi Koran Mandala dalam menjalankan fungsi kontrol sosial?

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumentasi, penelitian ini menemukan sejumlah pola kerja serta pandangan jurnalis Koran Mandala mengenai fungsi watchdog pers di Kota Bandung. Temuan menunjukkan bahwa Koran Mandala berupaya mempertahankan komitmen terhadap jurnalisme kritis yang berpihak pada kepentingan publik. Namun, praktik tersebut masih dibatasi oleh faktor struktural seperti ketergantungan ekonomi pada iklan lokal, kedekatan relasi dengan pemerintah daerah, serta keterbatasan sumber daya redaksional. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara idealisme profesional dan realitas operasional di lapangan.

Agar temuan ini tidak berhenti pada deskripsi empiris semata, analisis berikut mengkaitkannya secara langsung dengan kerangka teori yang telah dibahas. Perspektif watchdog journalism Norris (2000) dan Waisbord (2000) menekankan kepada kebutuhan akan independensi media, kemampuan investigatif, serta keberanian untuk mengungkap penyimpangan kekuasaan. Dengan menggunakan lensa teori tersebut, pembahasan akan menganalisis apakah praktik yang dijalankan Koran Mandala memenuhi standar watchdog yang ideal atau justru menunjukkan pola soft watchdog akibat tekanan politik-ekonomi. Selain itu, konsep ruang publik dan civil society (Habermas, 1989; Cohen & Arato, 1992) digunakan untuk menilai sejauh mana Koran Mandala berperan memperluas ruang diskusi publik dan mendorong akuntabilitas pemerintah daerah.

Analisis ini tidak hanya memeriksa kesesuaian temuan dengan teori, tetapi juga mempertimbangkan perbedaannya dengan studi terdahulu yang menyoroti kondisi media Indonesia pascareformasi khususnya penelitian 2022–2023 yang menemukan melemahnya independensi media akibat intervensi politik dan tekanan ekonomi. Jika pembahasan berfungsi menjembatani fakta empiris dengan kerangka teoritis, sekaligus memperlihatkan posisi Koran Mandala dalam dinamika media lokal kontemporer.

Bagian pembahasan juga akan mengelaborasi implikasi teoritis dan praktis dari temuan penelitian ini. Secara teoritis, hasil studi dapat memperkaya diskusi mengenai bagaimana fungsi watchdog bekerja dalam konteks media lokal yang memiliki sumber daya terbatas. Secara praktis, temuan memberikan dasar bagi rekomendasi penguatan independensi redaksi serta peningkatan kolaborasi antara pers, masyarakat sipil, dan pemerintah daerah untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Jika pendekatan analitis ini, pembahasan tidak hanya mendeskripsikan temuan, tetapi secara kritis menilai signifikansi dan kontribusinya terhadap studi media dan demokrasi lokal.

1. Kebijakan Redaksi terhadap Pemberitaan Kritis

Hasil wawancara dengan jajaran redaksi Koran Mandala menunjukkan bahwa kebijakan redaksi terhadap pemberitaan kritis berakar pada filosofi dasar media tersebut yang tercermin dalam tagline “Tunjukkan yang Salah, Benarkan yang Benar.” Semboyan ini tidak hanya berfungsi sebagai slogan redaksional, tetapi juga sebagai pedoman etik dan ideologis yang mengarahkan seluruh proses produksi berita. Nilai tersebut menegaskan orientasi media terhadap pencarian kebenaran faktual dan keberanian moral dalam mengungkap penyimpangan yang terjadi di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat. Pada jurnalisme lokal, prinsip ini memperlihatkan komitmen Koran Mandala untuk menjalankan fungsi kontrol sosial melalui praktik pemberitaan yang independen, akurat, dan berpihak pada kepentingan publik.

Redaksi Koran Mandala menempatkan isu-isu pemerintahan Kota Bandung sebagai pusat perhatian (*center of point*) dalam setiap liputan. Fokus ini sejalan dengan fungsi watchdog journalism sebagaimana dikemukakan oleh Norris (2000), yang menempatkan media sebagai mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan politik dan administrasi publik. Keberanian redaksi dalam memuat isu-isu sensitif dengan sudut pandang jurnalistik menunjukkan adanya fungsi kontrol horizontal di mana media berperan sebagai pengimbang kekuasaan pemerintah daerah. Sikap ini memperlihatkan upaya media untuk menjaga jarak profesional terhadap kepentingan politik serta mempertahankan independensi dalam menentukan arah liputan.

Hasil wawancara mengindikasikan bahwa Koran Mandala menerapkan kebijakan redaksional yang mengutamakan verifikasi dan validitas data dalam setiap pemberitaan kritis. Proses editorial dilakukan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential journalism*), di mana setiap informasi diuji secara berlapis untuk menghindari bias dan potensi gugatan hukum. Kebijakan ini mencerminkan kesadaran redaksi terhadap tanggung jawab sosial pers sebagaimana ditegaskan dalam teori *Social Responsibility of the Press* (Siebert et al., 1956), yang menekankan keseimbangan antara kebebasan pers dan tanggung jawab etis terhadap masyarakat. Pemberitaan kritis Koran Mandala bukan sekadar bentuk perlawanan simbolik terhadap kekuasaan, melainkan manifestasi dari etika profesional yang menempatkan kebenaran dan kepentingan publik sebagai prioritas utama.

Dalam perspektif *civil society*, komitmen Koran Mandala terhadap pemberitaan kritis dapat dipahami sebagai upaya memperkuat ruang publik deliberatif sebagaimana dijelaskan oleh Habermas (1989). Melalui pemberitaan yang menyoroti isu kebijakan publik, transparansi anggaran, dan kinerja birokrasi, Koran Mandala berperan sebagai sarana bagi warga untuk memperoleh informasi yang relevan bagi partisipasi politik dan kontrol sosial. Dengan cara ini, media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai aktor masyarakat sipil yang mengartikulasikan kepentingan warga terhadap pemerintah daerah. Hubungan dialektis antara media dan masyarakat ini memperkuat peran pers sebagai bagian integral dari *civil society* yang otonom dari kekuasaan negara maupun tekanan pasar.

Hasil temuan konsisten dengan pemikiran Waisbord (2000), yang menekankan *watchdog journalism* di negara-negara demokrasi berkembang tidak hanya ditentukan oleh kebebasan formal, tetapi juga oleh budaya profesional dan keberanian moral jurnalis. Koran Mandala, keberanian memuat isu-isu sensitif dengan tetap berpegang pada prinsip jurnalistik menunjukkan internalisasi nilai-nilai *watchdog* dalam budaya redaksi. Keputusan untuk tetap memberitakan isu pemerintahan meskipun berpotensi menimbulkan tekanan politik memperlihatkan bahwa redaksi menjalankan fungsi kontrol bukan sebagai reaksi spontan, melainkan sebagai hasil dari kesadaran profesional dan etika publik.

Berdasarkan penjelasan di atas kebijakan redaksi Koran Mandala terhadap pemberitaan kritis tidak hanya mencerminkan implementasi fungsi watchdog secara konseptual, tetapi juga menjadi indikator keberfungsian media sebagai bagian dari civil society yang aktif. Orientasi redaksi pada kebenaran, akuntabilitas, dan keberanian menghadapi risiko politik menegaskan posisi Koran Mandala sebagai media lokal yang menjalankan mandat demokrasi. Melalui kebijakan ini, Koran Mandala turut memperkuat struktur sosial yang mendukung transparansi pemerintahan dan kesadaran warga dalam mengontrol kekuasaan publik di Kota Bandung.

2. Liputan Watchdog Koran Mandala

Berdasarkan hasil wawancara dengan tim redaksi, Koran Mandala memiliki agenda redaksional yang berorientasi pada jurnalisme pengawasan (*watchdog journalism*) melalui program “Liputan Khusus” yang dilakukan secara rutin setiap bulan. Program ini dirancang sebagai bentuk tanggung jawab sosial media dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan publik dan penyelenggaraan pemerintahan. Melalui liputan mendalam (*in-depth reporting*), redaksi tidak hanya menyoroiti isu permukaan, tetapi berupaya menggali akar masalah dengan menghadirkan berbagai perspektif dari pemangku kepentingan seperti anggota DPRD, akademisi, praktisi, serta masyarakat terdampak. Pendekatan investigatif dan multi-narasumber ini mencerminkan penerapan prinsip jurnalisme watchdog sebagaimana dikemukakan oleh Waisbord (2000), yaitu mengungkap penyimpangan kebijakan dan persoalan publik secara berbasis bukti dan verifikasi mendalam.

Liputan Koran Mandala mengenai persoalan menumpuknya sampah di Kota Bandung menunjukkan bagaimana media ini menjalankan fungsi pengawasan. Redaksi menelusuri masalah dari berbagai aspek—mulai dari kebijakan pemerintah kota, hambatan teknis pengangkutan, hingga dampak yang dirasakan warga. Cara kerja seperti ini mencerminkan fungsi scrutiny sebagaimana dijelaskan Norris (2000), yaitu ketika media memeriksa konsistensi kebijakan dan menghubungkannya dengan kepentingan publik. Praktik tersebut memperlihatkan peran Mandala sebagai penghubung antara warga dan pemerintah, sesuai gagasan Norris mengenai media sebagai intermediary institution dalam demokrasi.

Jika dilihat melalui pandangan Waisbord (2000), liputan ini menunjukkan pola *accountability journalism* karena fokusnya tidak hanya mencari aktor individu yang bersalah, tetapi menelusuri kelemahan institusional dalam pengelolaan sampah. Liputan Mandala bergerak pada level struktural dan menyoroti bagaimana kegagalan koordinasi, perencanaan, dan evaluasi kebijakan berdampak pada kehidupan warga. Pendekatan semacam ini dekat dengan konsep *structural watchdog* yang ditekankan Waisbord.

Liputan mengenai kemacetan Kota Bandung memperlihatkan pola serupa. Redaksi menampilkan temuan dari wawancara lapangan, pengamatan langsung, serta pendapat para pemangku kepentingan. Mandala menunjukkan kelemahan koordinasi antarinstansi, minimnya inovasi kebijakan transportasi, dan dampak yang dirasakan masyarakat. Pembahasan isu ini menampilkan fungsi media sebagai ruang pembentukan opini publik yang kritis, sebagaimana dijelaskan Habermas (1989). Mandala menyediakan arena bagi warga untuk memahami masalah kota mereka, menyuarakan keberatan, dan menilai kebijakan pemerintah secara terbuka.

Pendekatan ini juga sejalan dengan gagasan Cohen & Arato (1992) yang menempatkan media sebagai bagian dari masyarakat sipil. Mandala memberikan sorotan pada masalah yang menghambat kepentingan publik dan mendorong pemerintah merespons tekanan masyarakat. Liputan-liputan tersebut memperlihatkan bagaimana media lokal dapat memainkan peran sebagai agen kontrol sosial, meskipun bekerja dalam kondisi yang penuh keterbatasan.

Di luar isu pemerintahan daerah, redaksi Koran Mandala juga menunjukkan komitmen terhadap isu sosial yang memiliki implikasi moral dan hukum. Liputan mendalam tentang apartemen yang dijadikan lokasi prostitusi daring merupakan contoh penerapan fungsi *watchdog* dalam ranah sosial, di mana media bertugas menyoroti praktik penyimpangan yang berpotensi melanggar norma hukum dan nilai kemanusiaan. Liputan semacam ini memperlihatkan keberanian media lokal dalam mengangkat isu-isu yang sering diabaikan oleh media arus utama, serta memperkuat fungsi pers sebagai penjaga moral publik (*moral guardian*).

Koran Mandala memperluas cakupan liputan investigatifnya dengan mengulas fenomena pernikahan dini di Kabupaten Garut. Liputan ini tidak hanya berfokus pada dimensi peristiwa, tetapi juga pada sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi tingginya angka pernikahan usia anak. Melalui pendekatan humanis dan edukatif, redaksi berupaya membangun kesadaran masyarakat serta mengingatkan pemerintah daerah akan urgensi intervensi kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi watchdog tidak terbatas pada kritik terhadap pemerintah, tetapi juga berperan sebagai katalis bagi transformasi sosial yang lebih luas.

Program Liputan Khusus Koran Mandala menjadi representasi nyata penerapan watchdog journalism di tingkat lokal. Melalui peliputan yang berbasis riset dan wawancara multipihak, media ini menjalankan fungsi kontrol sosial sekaligus pendidikan publik. Secara konseptual, praktik tersebut mengafirmasi pandangan Norris (2000) bahwa media yang independen dan berorientasi publik dapat memperkuat demokrasi melalui peningkatan kesadaran warga dan transparansi kebijakan. Dalam perspektif *civil society*, aktivitas jurnalisme kritis Koran Mandala juga berkontribusi pada terbentuknya ruang publik deliberatif di Bandung, di mana warga dapat menilai, mengkritik, dan menuntut akuntabilitas pemerintah secara lebih partisipatif.

Oleh karena itu, liputan watchdog yang dilakukan secara konsisten oleh Koran Mandala tidak hanya mencerminkan profesionalisme jurnalistik, tetapi juga menegaskan peran media lokal sebagai elemen masyarakat sipil yang aktif dan konstruktif. Inisiatif redaksi untuk menghadirkan liputan mendalam atas isu publik menunjukkan keberpihakan media terhadap kepentingan warga, serta menjadi bukti nyata bahwa fungsi kontrol sosial dapat dijalankan secara produktif tanpa kehilangan objektivitas dan etika jurnalistik.

3. Cara Menjaga Independensi Redaksi

Independensi redaksi merupakan fondasi utama dalam menjalankan fungsi watchdog journalism. Berdasarkan hasil wawancara, Koran Mandala menegaskan bahwa upaya menjaga independensi redaksi dilakukan melalui pemisahan yang tegas antara ruang redaksi dan ruang bisnis. Prinsip ini menjadi bentuk penerapan nyata dari apa yang di dalam kajian media disebut sebagai *editorial independence*,

yakni pemisahan keputusan editorial dari kepentingan ekonomi maupun politik. Redaksi menegaskan bahwa tim bisnis tidak memiliki otoritas untuk memengaruhi angle atau sudut pandang pemberitaan atau menentukan isu yang akan diangkat. Keputusan redaksional sepenuhnya ditentukan oleh pertimbangan jurnalistik yang berorientasi pada kepentingan publik. Praktik ini sejalan dengan pandangan Pippa Norris (2000) bahwa kebebasan media merupakan prasyarat bagi keberfungsian watchdog journalism, di mana kontrol terhadap kekuasaan hanya dapat dilakukan jika media terbebas dari tekanan struktural, baik ekonomi maupun politik.

Selain pemisahan ruang bisnis dan redaksi, penerapan Kode Etik Jurnalistik juga menjadi landasan normatif bagi Koran Mandala dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik. Redaksi menyebutkan bahwa Koran Mandala telah terverifikasi administratif oleh Dewan Pers, yang berarti secara kelembagaan media ini telah memenuhi standar profesionalisme dalam produksi berita, mulai dari proses verifikasi data, keberimbangan narasumber, perlindungan privasi, hingga pencegahan konflik kepentingan. Kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi bentuk konkret tanggung jawab sosial media terhadap masyarakat. Dalam perspektif teori Social Responsibility of the Press (Siebert et al., 1956), tindakan ini mencerminkan fungsi pers yang bebas namun tetap bertanggung jawab, di mana kebebasan berekspresi senantiasa diimbangi oleh kewajiban moral untuk menjunjung kebenaran dan keadilan informasi.

Redaksi Koran Mandala juga menekankan pentingnya menjaga jarak profesional dengan narasumber, baik dari kalangan pejabat pemerintah, pengusaha, organisasi masyarakat, maupun kelompok kepentingan tertentu. Kedekatan personal yang berlebihan dianggap dapat menimbulkan bias yang tidak disadari dan berpotensi mengganggu objektivitas liputan. Redaksi menerapkan prinsip “cukup dekat untuk memperoleh informasi, namun cukup jauh untuk tetap kritis.” Prinsip ini mencerminkan kesadaran profesional bahwa jurnalis harus beroperasi dalam keseimbangan antara akses informasi dan independensi penilaian. Konsep tersebut selaras dengan pandangan dari Silvio Waisbord (2000),

yang menegaskan bahwa *watchdog journalism* menuntut adanya *critical distance* antara media dan sumber kekuasaan untuk memastikan kebebasan berpikir dan integritas moral jurnalis.

4. Hubungan Media, Pemerintah, dan Masyarakat

a. Hubungan Media dengan Pemerintah

Hasil wawancara dengan redaksi Koran Mandala menunjukkan adanya kesadaran profesional yang tinggi dalam membangun hubungan dengan pemerintah. Redaksi menegaskan bahwa memiliki relasi yang baik dengan lembaga pemerintahan merupakan hal yang positif, terutama dalam keterbukaan informasi publik dan kelancaran komunikasi antara media dan aparatur negara. Namun hubungan tersebut tidak dijadikan dasar untuk membentuk loyalitas yang berlebihan terhadap pemerintah. Dalam perspektif redaksional, pemerintah merupakan pihak yang penting untuk diawasi, bukan mitra yang harus dibela. Sikap ini memperlihatkan posisi media sebagai institusi independen yang berfungsi menjalankan peran *check and balance* terhadap kekuasaan negara.

Prinsip tersebut selaras dengan konsep *watchdog journalism* yang dikemukakan oleh Pippa Norris (2000), yang menempatkan media sebagai mekanisme akuntabilitas horizontal dalam sistem demokrasi. Dengan memegang teguh independensi editorial, Koran Mandala memastikan bahwa pemberitaan terhadap pemerintah tidak didasarkan pada kedekatan hubungan personal, tetapi pada nilai-nilai objektivitas, verifikasi, dan kepentingan publik. Pandangan ini juga konsisten dengan teori *civil society* Habermas (1989), di mana media berperan sebagai ruang publik deliberatif yang memungkinkan wacana kritis terhadap kebijakan pemerintah berlangsung secara terbuka dan rasional. Melalui pendekatan ini, media lokal seperti Koran Mandala mampu mengawasi praktik kekuasaan tanpa kehilangan etika komunikasi, sekaligus menjaga kredibilitasnya sebagai lembaga pengawas sosial.

b. Hubungan Media dengan Masyarakat

Dalam hubungan dengan masyarakat, redaksi Koran Mandala memandang dirinya sebagai jembatan informasi antara warga dan struktur kekuasaan. Media memiliki tanggung jawab moral untuk menyajikan informasi secara akurat, faktual,

dan bebas dari distorsi atau hoaks. Redaksi menegaskan bahwa masyarakat bukan sekadar audiens pasif, melainkan mitra aktif dalam membentuk orientasi pemberitaan. Dalam pandangan redaksi, masyarakat berfungsi sebagai “kompas arah utara” yang menentukan kelayakan suatu berita, relevansi sudut pandang, dan sejauh mana isu tersebut memiliki dampak sosial. Hal ini mencerminkan bentuk partisipasi publik dalam ruang media, di mana preferensi, aspirasi, dan respons warga turut memengaruhi arah liputan dan prioritas isu.

Prinsip kemitraan antara media dan masyarakat sebagaimana dijalankan oleh Koran Mandala mencerminkan esensi *civil society* sebagaimana dirumuskan oleh Cohen dan Arato (1992), yakni ranah sosial yang terbentuk dari jaringan komunikasi, organisasi, dan tindakan kolektif warga di luar kontrol negara. Dalam kerangka ini, media berfungsi sebagai *public mediator* yang menghubungkan kepentingan warga dengan kebijakan publik, sehingga memungkinkan terjadinya proses demokrasi partisipatif di tingkat lokal. Melalui interaksi ini, Koran Mandala tidak hanya menjadi penyalur informasi, tetapi juga wahana pendidikan publik yang memperkuat literasi politik dan kesadaran kritis masyarakat.

5. Hambatan Internal maupun Eksternal

Hasil wawancara dengan redaksi Koran Mandala menunjukkan bahwa dalam menjalankan fungsi watchdog, media ini menghadapi berbagai tantangan, terutama yang bersumber dari faktor eksternal. Hambatan eksternal tersebut umumnya berasal dari pihak-pihak yang merasa kepentingannya terganggu akibat pemberitaan kritis, baik dari kalangan pemerintah maupun sektor swasta. Dalam beberapa kasus, redaksi mengaku mengalami bentuk-bentuk pembatasan akses informasi dan intimidasi halus, seperti ancaman agar tidak mengungkap data secara terbuka kepada publik atau upaya penundaan pemberian informasi resmi. Situasi semacam ini menunjukkan bahwa kebebasan pers di tingkat lokal masih berhadapan dengan tekanan kekuasaan dan resistensi terhadap transparansi. Hambatan ini memperlihatkan bahwa watchdog journalism tidak hanya memerlukan keberanian moral jurnalis, tetapi juga perlindungan struktural dari sistem hukum dan politik yang mendukung kebebasan berekspresi.

Angelina Qur'ainny, Zahran Fauzi Hidayat dan Muradi
Peran Media Koran Mandala dalam Fungsi Watchdog Pers sebagai Bagian dari Civil Society di Kota Bandung

Fenomena tersebut sejalan dengan temuan Waisbord (2000), yang menjelaskan bahwa jurnalisme watchdog di negara-negara berkembang seringkali terkendala oleh ketidakseimbangan relasi kekuasaan antara media dan institusi negara. media lokal menghadapi dilema antara menjaga keberlangsungan operasional dan mempertahankan independensi editorial. Meskipun secara formal kebebasan pers telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pada praktiknya masih terdapat bentuk tekanan non-struktural yang menghambat kerja jurnalistik kritis, seperti pembatasan informasi, ancaman reputasi, hingga penolakan pejabat untuk diwawancarai.

Hambatan eksternal tersebut menjadi tantangan serius bagi pelaksanaan fungsi kontrol sosial media, terutama ketika menyangkut isu-isu sensitif yang berimplikasi politik atau ekonomi. Kemudian dari sisi internal, redaksi Koran Mandala mengungkapkan bahwa tidak terdapat hambatan signifikan dalam menjalankan liputan kritis. Hal ini disebabkan oleh struktur organisasi redaksi yang relatif kecil namun solid, serta kesamaan visi antara jurnalis dan pimpinan redaksi untuk menjaga independensi dan profesionalisme pemberitaan. Tidak adanya intervensi internal menunjukkan bahwa media ini telah berhasil membangun *culture of integrity* dalam lingkungan redaksionalnya. Kondisi ini mendukung pandangan Norris (2000) bahwa efektivitas *watchdog journalism* ditentukan oleh kekuatan internal media, terutama nilai-nilai profesionalisme, kohesi tim, dan kejelasan standar etika yang diterapkan secara konsisten.

Apabila dikaitkan dengan teori *civil society*, hambatan eksternal yang dialami Koran Mandala mencerminkan masih terbatasnya ruang publik deliberatif di tingkat lokal. Menurut Habermas (1989), *public sphere* yang sehat hanya dapat terwujud apabila warga, media, dan negara berinteraksi dalam kerangka komunikasi rasional tanpa dominasi atau represi. Ancaman terhadap kebebasan pers menunjukkan bahwa relasi tersebut belum sepenuhnya setara, di mana media masih menghadapi tekanan struktural yang membatasi perannya sebagai pengawas kebijakan publik.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Media Koran Mandala dalam Fungsi *Watchdog* Pers sebagai Bagian dari *Civil Society* di Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa Koran Mandala secara konsisten menjalankan fungsi pengawasan (*watchdog*) terhadap kebijakan publik dan praktik pemerintahan daerah melalui kebijakan redaksi yang independen, program liputan mendalam, serta komitmen terhadap kode etik jurnalistik. Prinsip redaksional yang berlandaskan pada tagline “Tunjukkan yang Salah, Benarkan yang Benar” menjadi manifestasi konkret dari kesadaran moral media terhadap tanggung jawab sosialnya. Melalui liputan khusus yang berorientasi pada isu-isu publik seperti pengelolaan sampah, kemacetan, prostitusi daring, dan pernikahan dini, Koran Mandala berperan aktif dalam menegakkan transparansi, mengedukasi masyarakat, dan mengingatkan pemerintah terhadap fungsi pelayanan publik.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa independensi redaksi Koran Mandala terjaga melalui pemisahan yang jelas antara ruang bisnis dan ruang redaksi, penerapan kode etik yang ketat, serta sikap profesional dalam menjaga jarak kritis dengan narasumber. Hubungan media dengan pemerintah dibangun secara komunikatif namun tetap berlandaskan objektivitas jurnalistik, sementara hubungan media dengan masyarakat terjalin dalam bentuk kemitraan informatif yang menempatkan publik sebagai orientasi utama pemberitaan. Dengan demikian, media ini tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai elemen *civil society* yang berkontribusi terhadap pembentukan ruang publik deliberatif di tingkat lokal.

Meskipun demikian, hasil penelitian menemukan adanya hambatan eksternal berupa tekanan non-struktural, seperti pembatasan akses informasi dan ancaman halus dari pihak-pihak yang merasa terganggu oleh pemberitaan kritis. Kondisi ini menandakan bahwa praktik *watchdog journalism* di tingkat lokal masih menghadapi tantangan dari aspek politik dan budaya birokrasi yang belum sepenuhnya transparan. Namun demikian, secara internal, Koran Mandala memiliki ketahanan organisasi yang kuat dan solidaritas profesional yang tinggi, sehingga tetap mampu mempertahankan integritas dan keberanian dalam menjalankan fungsi pengawasan publik.

Angelina Qur'ainny, Zahran Fauzi Hidayat dan Muradi
Peran Media Koran Mandala dalam Fungsi Watchdog Pers sebagai Bagian dari Civil Society di Kota Bandung

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pandangan Pippa Norris (2000) dan Silvio Waisbord (2000) bahwa efektivitas watchdog journalism bergantung pada independensi media dan profesionalisme redaksi, serta sejalan dengan teori civil society Habermas (1989) yang menempatkan media sebagai bagian dari ruang publik otonom. Implikasi praktis dari penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas media lokal agar mampu mempertahankan independensi dan memperluas peran edukatifnya bagi masyarakat. Peneliti merekomendasikan agar pemerintah daerah lebih terbuka terhadap kerja jurnalistik dan memperkuat perlindungan terhadap kebebasan pers, sementara bagi Koran Mandala, perlu dilakukan penguatan jaringan kolaborasi dengan lembaga masyarakat sipil untuk memperbesar dampak advokatif dari liputan kritis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ambardi, Kuskridho dkk.. 2017. *Kualitas Jurnalisme Publik di Media Online: Kasus Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Cohen, Jean L. dan Andrew Arato. 1992. *Civil Society And Political Theory*. (Cambridge, MA: MIT Press).
- Habermas, Jurgen. 1989. *The Structural Transformation Of The Public Sphere*. (Cambridge, MA: MIT Press).
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1994. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications).
- Norris, Pippa. 2000. *A Virtuous Circle: Political Communications In Postindustrial Societies*. (Cambridge, UK: Cambridge University Press).
- Siebert, Fred S., Theodore Peterson, & Wilbur Schramm. 1956. *Four Theories Of The Press*. (Urbana, IL: University Of Illinois Press).
- Waisbord, Silvio. 2000. *Watchdog Journalism In South America: News, Accountability, And Democracy*. (New York: Columbia University Press).

Publikasi

- Alyatalatthaf, S. dan Putri, I. A. *Tempo's Watchdog Journalism Toward The Indonesian Government's Policy On COVID-19*. Jurnal ASPIKOM. Vol.7 No. 2 (2022).
- Hady, N. dan Ibrahim, R. *State Relations, Media And The Power Of Civil Society After The Fall Of The New Order Regime In Indonesia*. Jurnal Studi Masyarakat. Vol.14. No.2 (2023).
- Krisdinanto, N., Apul, M. M. B. dan Ritonga, R.. *Critical Moment for Indonesian journalism: Disappearance of Journalistic Firewall*. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication. Vol.40. No.2 (2024).
- Putra, R. A., Lestari, D. dan Widodo, F. *Press Freedom In Indonesia: Inconsistencies To Southeast Asian Regional Approaches*. Frontiers In Communication. Vol.9 (2024).
- Rusfiana, A. dan Kurniasih, L. *The Role Of Civil Society Organizations In Promoting Social And Political Change In Indonesia*. Journal Of Emerging Economies And Citizen Studies. Vol.8. No.1 (2024).
- Wijayanto, M. *"Polite Watchdog": Kompas And Watchdog Journalism In Post-Authoritarian Indonesia*. The International Journal of Press/Politics. Vol.29. No.3 (2023).

Website

- Humas FISIP UI. (2023). *Kebebasan Media Lokal pada Era Desentralisasi Demokratis: Relasi Kuasa Antara Media Lokal dan Pemerintah Lokal*. diakses dari <https://fisip.ui.ac.id/kebebasan-media-lokal-pada-era-desentralisasi-demokratis-relasi-kuasa-antara-media-lokal-dan-pemerintah-lokal/>. diakses pada 22 Desember 2025.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.